

BAB IV
ANALISIS PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KAWASAN GASIBU

4.1 Analisis Persepsi Pedagang Tentang Kegiatan Perdagangan Kaki lima di Kawasan Gasibu

4.1.1 Persepsi Pedagang Terhadap Penanganan Masalah PKL

Dalam penanganan masalah kepadatan PKL di Kawasan Gasibu yang menyebabkan permasalahan kemacetan lalu lintas harus secara holistik, sinergi dengan para *stakeholder's* serta melibatkan pasrtisipasi dari pelaku dalam hal ini pedagang itu sendiri agar peran serta tersebut dapat merumuskan jalan keluar terbaik (*win-win Solution*) terhadap berlarut-larutnya permasalahan PKL ini. beberapa alternatif pengelolaan dan penataan Lokasional PKL untuk mengatasi masalah yang berlarut-larut di Kawasan Gasibu ini bila dilihat dari persepsi Pedagang dapat dilihat pada Tabel IV.1 berikut ini.

Tabel IV.1
Persepsi Pedagang Terhadap Penanganan Masalah PKL di Kawasan Gasibu

Zona	Penanganan masalah Lokasional PKL di Kawasan Gasibu						Jumlah Sampel
	Dipindahkan di Lokasi baru	Mengatur lokasi peruntukan kegiatan di Gasibu	Pembatasan Jumlah pedagang	Penutupan jalan-jalan tertentu	Pemanfaatan bagian tertentu dari jalan atau trotoar	Menghilangkan/Penerbitan pedagang	
ZONA 1							
Zona 1A	0	4	0	0	2	0	6
Zona 1B	0	8	5	4	6	0	23
Zona 1C	0	15	2	25	13	0	55
Zona 1D	0	7	5	3	3	0	18
Jumlah	0	34	12	32	24	0	102
Persentase (%)	0,00	33,33	11,76	31,37	23,53	0,00	100
ZONA 2							
Zona 2A	0	4	0	6	5	0	15
Zona 2B	2	20	0	28	14	0	64
Zona 2C	1	2	0	4	0	0	7
Jumlah	3	26	0	38	19	0	86
Persentase (%)	3,49	30,23	0,00	44,19	22,09	0,00	100
ZONA 3							
Zona 3A	1	2	0	14	7	0	24
Zona 3B	0	0	0	10	3	0	13
Zona 3C	1	7	0	1	3	0	12
Zona 3D	0	6	0	2	1	0	9

Zona	Penanganan masalah Lokasional PKL di Kawasan Gasibu						Jumlah Sampel
	Dipindahkan di Lokasi baru	Mengatur lokasi peruntukan kegiatan di Gasibu	Pembatasan Jumlah pedagang	Penutupan jalan-jalan tertentu	Pemanfaatan bagian tertentu dari jalan atau trotoar	Menghilangkan/Penertiban pedagang	
Zona 3E	0	3	0	0	1	0	4
Zona 3F	0	1	0	3	1	0	5
Jumlah	2	19	0	30	16	0	67
Persentase (%)	2,99	28,36	0,00	44,78	23,88	0,00	100
Total Seluruhnya	5	79	12	100	59	0	255
Total Persentase (%)	1,96	30,98	4,71	39,22	23,14	0,00	100

Sumber: Hasil tabulasi kuesioner, tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden pedagang sebesar 39,22% lebih memilih penutupan jalan-jalan tertentu di Kawasan Gasibu pada hari minggu pagi untuk memecahkan permasalahan kepadatan PKL, kemudian 30,98% mereka menjawab mengatur lokasi peruntukan kegiatan di Gasibu atau (*open market*) pada ruang-ruang terbuka pada Kawasan Gasibu untuk di tempati para pedagang. lalu 23,14% pedagang menjawab pemanfaatan bagian tertentu dari jalan atau trotoar. hanya 4,71% dan 1,96% yang menjawab dipindahkan di lokasi baru dan pembatasan Jumlah pedagang bahkan tidak ada yang memilih untuk menghilangkan/Penertiban pedagang. Hal ini karena mereka menganggap bahwa kebutuhan mereka sebagai pedagang sangat perlu adanya penanganan yang baik tanpa mengintimidasi mereka sebagai pelaku sektor informal.

4.1.2 Persepsi Pedagang Terhadap Peran Struktural Pemerintah

Selain pengelolaan lokasional dalam penataan dan pembinaan PKL pemerintah juga harus melakukan cara pengelolaan struktural. Adapun yang termasuk dalam pengelolaan struktural pemerintah terhadap PKL adalah :

1. Legalisasi/ Perizinan terhadap PKL
2. Pembinaan Sosial (termasuk Kesehatan dan Agama)
3. Bantuan atau pinjaman modal

Berdasarkan persepsi pedagang terhadap peran pemerintah dalam penataan dan pembinaan PKL dapat dilihat pada Tabel IV.2 berikut:

Tabel IV.2
Persepsi Pedagang Terhadap Peran Pemerintah

Zona	Legalisasi/ Perizinan	Pembinaan Sosial	Bantuan atau pinjaman modal	Jumlah Sampel
ZONA 1				
Zona 1A	2	0	4	6
Zona 1B	14	2	7	23
Zona 1C	33	3	19	55
Zona 1D	9	4	5	18
Jumlah	58	9	35	102
Persentase (%)	56,86	8,82	34,31	100,00
ZONA 2				
Zona 2A	3	0	12	15
Zona 2B	41	1	22	64
Zona 2C	6	0	1	7
Jumlah	50	1	35	86
Persentase (%)	58,14	1,16	40,70	100,00
ZONA 3				
Zona 3A	11	2	11	24
Zona 3B	1	2	10	13
Zona 3C	0	0	12	12
Zona 3D	1	0	8	9
Zona 3E	2	0	2	4
Zona 3F	3	1	1	5
Jumlah	18	5	44	67
Persentase (%)	26,87	7,46	65,67	100,00
Total Seluruhnya	126	15	114	255
Total Persentase (%)	49,41	5,88	44,71	100,00

Sumber: Hasil tabulasi kuesioner, tahun 2012

Menurut para responden pedagang legalisasi/perizinan dari pemerintah menjadi hal yang paling penting dalam usaha berdagang mereka kemudian setelah itu bantuan/pinjaman modal juga dapat membantu dalam perkembangan usaha mereka untuk mencapai usaha ke sektor formal.

Hanya 5,88% responden pedagang memilih pembinaan sosial padahal pembinaan sosial sangat penting bagi PKL. perlunya tindakan pengendalian dengan pembinaan terhadap kualitas pola pikir para pedagang dan pelaksanaan aktivitas PKL secara keseluruhan karena diketahui pola pikir PKL sebagian besar masih sederhana untuk menelaah peraturan yang ada sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang salah dan kurangnya perhatian mengenai visualisasi aktivitas secara keseluruhan.

4.1.3 Persepsi Pedagang Terhadap Pola Pengelompokan Dagangan

Bila dilihat dari pola pengelompokan PKL dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis pola yaitu berkelompok dengan kelompok dagangan yang sejenis dan kelompok dagangan bercampur. Menurut responden PKL terhadap pengelompokan dalam usaha berdagangnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3
Pengelompokan Pedagang berdasarkan Persepsi Pedagang

Zona	Pola Pengelompokan				Jumlah Sampel
	Blok-Blok Sejenis		Bercampur		
	Memudahkan pilihan	Mudah dicari konsumen	Mengurangi persaingan	Menarik niat pembeli	
ZONA 1					
Zona 1A	1	0	3	2	6
Zona 1B	2	11	5	5	23
Zona 1C	9	21	20	5	55
Zona 1D	6	3	5	4	18
Jumlah	18	35	33	16	102
Persentase (%)	17.65	34.31	32.35	15.69	100
ZONA 2					0
Zona 2A	9	5	1	0	15
Zona 2B	16	25	19	4	64
Zona 2C	0	2	2	3	7
Jumlah	25	32	22	7	86
Persentase (%)	29.07	37.21	25.58	8.14	100
ZONA 3					0
Zona 3A	1	9	11	3	24
Zona 3B	5	2	6	0	13
Zona 3C	0	6	5	1	12
Zona 3D	6	2	1	0	9
Zona 3E	3	0	0	1	4
Zona 3F	0	3	0	2	5
Jumlah	15	23	22	7	67
Persentase (%)	22.39	34.33	32.84	10.45	100
Total Seluruhnya	58	90	77	30	255
Total Persentase (%)	22.75	35.29	30.20	11.76	100

Sumber: Hasil tabulasi kuesioner, tahun 2012

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebesar (58,04%) pedagang yang memilih untuk menjajakan dagangannya secara sejenis dengan jenis dagangan yang sama. Kemudian dari total persentase tersebut 35,29% diantaranya dengan alasan mudah dicari konsumen dan 22,75% dengan alasan untuk memberikan

kemudahan bagi konsumen untuk melihat-lihat terlebih dahulu sebelum menentukan pilihannya. Sedangkan total yang memilih pengelompokan bercampur sebesar (41,96%) dengan alasan terbanyak sebesar 30,20% yaitu mengurangi persaingan antara pedagang yang sejenis. Yang dimaksud bercampur dengan dagangan jenis lain yaitu misalnya pedagang makanan/minuman akan memilih berdagang pada lokasi yang bersebelahan dengan jenis dagangan selain makanan/minuman.

4.1.4 Persepsi Pedagang Terhadap Penataan/Pengaturan

Dengan adanya perda Nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebenarnya telah ada alat hukum untuk mengatur dan menata para pedagang menjadi lebih tertib dan teratur. Namun ternyata berdasarkan persepsi pedagang setuju masih perlunya pengaturan/penataan yang jelas mengenai keberadaan mereka di Kawasan Gasibu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut:

Tabel IV.4
Persepsi PKL Terhadap Pengaturan

Zona	Perlu Pengaturan				Jumlah Sampel
	Setuju		Tidak		
	Lebih Teratur	Menarik Konsumen	Sudah rapi	Perlu biaya/tenaga	
ZONA 1					
Zona 1A	2	1	0	3	6
Zona 1B	10	3	2	8	23
Zona 1C	8	31	3	13	55
Zona 1D	7	5	2	4	18
Jumlah	27	40	7	28	102
Persentase (%)	26,47	39,22	6,86	27,45	100
ZONA 2					
Zona 2A	9	5	1	0	15
Zona 2B	25	19	3	17	64
Zona 2C	0	3	1	3	7
Jumlah	34	27	5	20	86
Persentase (%)	39,53	31,40	5,81	23,26	100
ZONA 3					
Zona 3A	7	6	2	9	24
Zona 3B	6	3	0	4	13
Zona 3C	4	2	1	5	12

Zona	Perlu Pengaturan				Jumlah Sampel
	Setuju		Tidak		
	Lebih Teratur	Menarik Konsumen	Sudah rapi	Perlu biaya/tenaga	
Zona 3D	7	2	0	0	9
Zona 3E	3	0	0	1	4
Zona 3F	1	2	0	2	5
Jumlah	28	15	3	21	67
Persentase (%)	41,79	22,39	4,48	31,34	100
Total Seluruhnya	89	82	15	69	255
Total Persentase (%)	34,90	32,16	5,88	27,06	100

Sumber: Hasil tabulasi kuesioner, tahun 2012

Ternyata berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan pada responden pedagang di lapangan, ternyata persepsi para pedagang terhadap perlunya penataan/pengaturan adalah cukup besar. Sebagian besar responden (67,06%) PKL menganggap perlu diadakan pengaturan. Alasan utama mereka yang menginginkan pengaturan pada lokasi adalah sebagian besar (34,9%) agar lebih teratur rapi dan sebagian yang lain (32,16%) supaya dapat menarik konsumen sehingga akan meningkatkan pendapatan mereka. Para pedagang yang tidak menginginkan adanya pengaturan mengemukakan alasannya adalah bahwa tempat mereka telah rapi dan teratur dan sebagian lagi menganggap pengaturan akan memerlukan biaya dan tenaga.

Sedangkan menurut para pedagang, Jika adanya pengaturan hal-hal yang perlu dilakukan penataan/pengaturan oleh pemerintah maka adalah seperti pada tabel IV.5 berikut:

Tabel IV.5
Hal-Hal Yang Perlu Diatur

Zona	Yang Perlu Diatur				Jumlah Sampel
	Jenis Dagangan	Sarana Dagang	Waktu	Tempat	
ZONA 1					
Zona 1A	0	2	1	3	6
Zona 1B	0	8	1	14	23
Zona 1C	2	33	6	14	55
Zona 1D	1	5	3	9	18
Jumlah	3	48	11	40	102
Persentase (%)	2,94	47,06	10,78	39,22	100

Zona	Yang Perlu Diatur				Jumlah Sampel
	Jenis Dagangan	Sarana Dagang	Waktu	Tempat	
ZONA 2					
Zona 2A	2	8	2	3	15
Zona 2B	4	12	8	40	64
Zona 2C	0	3	1	3	7
Jumlah	6	23	11	46	86
Persentase (%)	6,98	26,74	12,79	53,49	100
ZONA 3					
Zona 3A	0	15	2	7	24
Zona 3B	2	3	0	8	13
Zona 3C	3	7	1	1	12
Zona 3D	0	1	8	0	9
Zona 3E	3	0	0	1	4
Zona 3F	0	2	0	3	5
Jumlah	8	28	11	20	67
Persentase (%)	11,94	41,79	16,42	29,85	100
Total Seluruhnya	17	99	33	106	255
Total Persentase (%)	6,67	38,82	12,94	41,57	100

Sumber: Hasil tabulasi kuesioner, tahun 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa menurut para pedagang, hal yang perlu diatur adalah tempat usaha dan sarana dagang, dimana sebesar 41,57% pedagang memilih tempat usahanya untuk diatur diikuti sarana dagang sebesar 38,82%. Kemudian waktu dan jenis dagangan berturut-turut sebesar 12,94% dan 6,67%. Bagi pedagang pengaturan sarana dagang, tempat usaha, waktu serta jenis dagangan akan dapat menarik konsumen. Pengaturan tersebut diharapkan juga dapat membatasi persaingan antar pedagang baru yang akan memasuki lokasi tersebut.

4.1.5 Persepsi Pedagang Terhadap Fasilitas Yang Perlu Ditambah

Meskipun telah ada Perda yang mengatur Pedagang Kaki Lima, namun seperti pada umumnya sektor informal, kegiatan PKL biasanya belum terantisipasi dalam perencanaan tata ruang kota sehingga sarana dan prasarana yang ada belum mendukung kegiatannya. Misalnya adanya fasilitas dan utilitas umum seperti

listrik, tempat parkir, air bersih, sampah serta MCK/toilet untuk dapat memenuhi kebutuhan kegiatannya. Pada lokasi kajian yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ternyata Kawasan Gasibu termasuk Zona kuning yang berdasarkan tempat yaitu kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana Zona kuning ini yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat.

Maka dengan hal ini sangat perlu adanya *intervention* dari pemerintah dalam mengatur fasilitas umum karena fasilitas umum tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan kegiatan para pedagang, setidaknya dari hasil survai primer seperti terlihat pada Tabel IV.6 berikut:

Tabel IV.6
Fasilitas Umum Yang Perlu Ditambah

Zona	Fasilitas Umum Yang Perlu Ditambah					Jumlah Sampel
	Listrik	Air bersih	Tempat sampah	Parkir	Toilet	
ZONA 1						
Zona 1A	0	1	1	0	4	6
Zona 1B	0	5	4	6	8	23
Zona 1C	0	21	9	7	18	55
Zona 1D	0	5	3	3	7	18
Jumlah	0	32	17	16	37	102
Persentase (%)	0,00	31,37	16,67	15,69	36,27	100
ZONA 2						
Zona 2A	1	4	2	5	3	15
Zona 2B	4	18	19	7	16	64
Zona 2C	0	3	1	1	2	7
Jumlah	5	25	22	13	21	86
Persentase (%)	5,81	29,07	25,58	15,12	24,42	100
ZONA 3						
Zona 3A	0	10	2	7	5	24
Zona 3B	1	3	0	3	6	13
Zona 3C	0	2	1	4	5	12
Zona 3D	0	3	2	1	3	9
Zona 3E	0	2	0	1	1	4
Zona 3F	0	3	0	1	1	5
Jumlah	1	23	5	17	21	67
Persentase (%)	1,49	34,33	7,46	25,37	31,34	100
Total Seluruhnya	6	80	44	46	79	255
Total Persentase (%)	2,35	31,37	17,25	18,04	30,98	100

Sumber: Hasil tabulasi kuesioner, tahun 2012

Pada tabel diatas menurut responden PKL, fasilitas yang perlu ditambah adalah air bersih, tempat sampah, tempat parkir serta toilet. Pada saat ini para pedagang membawa air sendiri dari rumahnya untuk mencukupi kebutuhan cuci piring. Sedangkan pada Zona 1 fasilitas umum yang perlu ditambah adalah air bersih, dan toilet, karena tempat parkir telah cukup tersedia serta tempat sampah telah ada dan tiap hari petugas Dinas Kebersihan telah mengangkut sampah yang ada. begitu juga dengan Zona 3. Sedangkan pada Zona 2 sebagian besar responden menyatakan fasilitas yang perlu ditambah adalah fasilitas tempat sampah dan air bersih dikarenakan pada zona 2 sangat minim air bersih.

Menurut sebagian besar responden yang berada di di Kawasan Gasibu belum adanya sarana air bersih dan kekurangan sarana toilet/MCK merupakan kesulitan yang mereka hadapi. Setiap hari mereka membawa jerigen yang berisi air untuk mencuci piring dan gelas yang telah dipergunakan. Karena PKL Kawasan Gasibu merupakan kawasan perdagangan PKL secara temporer hari minggu atau disebut juga pasar kaget yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat, maka tempat parkir yang memadai diperlukan untuk meletakkan kendaraan mereka. Ketersediaan fasilitas umum akan menjadikan kenyamanan baik bagi pedagang maupun bagi pengunjung untuk beraktivitas.

4.2 Analisis Persepsi Pengunjung Tentang Kegiatan Perdagangan Kaki lima Di Kawasan Gasibu

Selanjutnya akan dibahas persepsi pengunjung mengenai keberadaan PKL pada lokasi penelitian karena keterbatasan penulis maka sampel yang diambil adalah disamakan dengan jumlah sampel PKL dari masing-masing lokasi.

4.2.1 Persepsi Pengunjung Terhadap Penanganan Masalah

Dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh kepadatan PKL di Kawasan Gasibu, bila dilihat dari persepsi pengunjung ada beberapa alternatif penanganan/pengelolaan lokasional PKL yang dapat dilihat pada Tabel IV.7 berikut ini.

Tabel IV.7
Persepsi Pengunjung Terhadap Penanganan Masalah PKL di Kawasan Gasibu

Zona	Penanganan Masalah Lokasional PKL di Kawasan Gasibu						Jumlah Sampel
	Dipindahkan di Lokasi baru	Mengatur lokasi peruntukan kegiatan di Gasibu	Pembatasan Jumlah pedagang	Penutupan jalan-jalan tertentu	Pemanfaatan bagian tertentu dari jalan atau trotoar	Menghilangkan/Penertiban pedagang	
ZONA 1							
Zona 1A	1	3	1	0	1	0	6
Zona 1B	0	9	5	4	5	0	23
Zona 1C	0	11	25	12	7	0	55
Zona 1D	4	3	5	4	2	0	18
Jumlah	5	26	36	20	15	0	102
Persentase (%)	4,90	25,49	35,29	19,61	14,71	0,00	100
ZONA 2							
Zona 2A	0	4	3	4	4	0	15
Zona 2B	1	15	21	13	14	0	64
Zona 2C	1	0	2	2	1	1	7
Jumlah	2	19	26	19	19	1	86
Persentase (%)	2,33	22,09	30,23	22,09	22,09	1,16	100
ZONA 3							
Zona 3A	1	2	4	14	3	0	24
Zona 3B	2	3	2	6	0	0	13
Zona 3C	1	3	4	2	2	0	12
Zona 3D	0	2	1	5	1	0	9
Zona 3E	0	0	1	0	0	3	4
Zona 3F	0	1	0	3	1	0	5
Jumlah	4	11	12	30	7	3	67
Persentase (%)	5,97	16,42	17,91	44,78	10,45	4,48	100
Total Seluruhnya	11	56	74	69	41	4	255
Total Persentase (%)	4,31	21,96	29,02	27,06	16,08	1,57	100

Sumber: Hasil tabulasi kuesioner, tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat secara keseluruhan bahwa responden pengunjung sebesar 29,02% lebih memilih pembatasan jumlah pedagang di Kawasan Gasibu pada hari minggu pagi untuk memecahkan permasalahan kepadatan PKL, kemudian 27,06% mereka menjawab penutupan jalan-jalan tertentu, lalu 21,96% memilih mengatur lokasi peruntukan kegiatan di Gasibu atau (*open market*) pada ruang-ruang terbuka pada Kawasan Gasibu untuk di tempati para pedagang. sedangkan 16,08% pengunjung menjawab pemanfaatan bagian tertentu dari jalan atau trotoar. hanya 4,31% dan 1,57% yang menjawab dipindahkan di lokasi baru dan pembatasan Jumlah pedagang dan tidak ada yang memilih untuk menghilangkan/penertiban pedagang. Hal ini karena mereka

menganggap bahwa mereka sebagai pengunjung langganan Gasibu merasa membutuhkan kehadiran para PKL sebagai salah satu tempat wisata belanja.

4.2.2 Persepsi Pengunjung Terhadap Peran Struktural Pemerintah

Berdasarkan persepsi pengunjung terhadap peran struktural pemerintah dalam penataan dan pembinaan PKL dapat dilihat pada Tabel IV.8 berikut:

Tabel IV.8
Persepsi Pengunjung Terhadap Peran Pemerintah

Zona	Legalisasi/ Perizinan	Pembinaan Sosial	Bantuan atau Pinjaman Modal	Jumlah Sampel
ZONA 1				
Zona 1A	0	6	0	6
Zona 1B	6	12	5	23
Zona 1C	17	13	25	55
Zona 1D	8	5	5	18
Jumlah	31	36	35	102
Persentase (%)	30,39	35,29	34,31	100,00
ZONA 2				
Zona 2A	2	4	9	15
Zona 2B	31	1	32	64
Zona 2C	4	2	1	7
Jumlah	37	7	42	86
Persentase (%)	43,02	8,14	48,84	100,00
ZONA 3				
Zona 3A	14	3	7	24
Zona 3B	5	2	6	13
Zona 3C	4	4	4	12
Zona 3D	1	3	5	9
Zona 3E	2	0	2	4
Zona 3F	3	0	2	5
Jumlah	29	12	26	67
Persentase (%)	43,28	17,91	38,81	100,00
Total Seluruhnya	97	55	103	255
Total Persentase (%)	38,04	21,57	40,39	100,00

Sumber: Hasil tabulasi kuesioner, tahun 2012

Menurut para responden pengunjung bantuan atau pinjaman modal dari pemerintah menjadi hal yang paling penting dalam usaha berdagang mereka kemudian setelah itu legalisasi/perizinan juga dapat mendukung dalam kegiatan usaha berdagang mereka agar selalu merasa aman dan nyaman.

Pemberian bantuan dan pinjaman modal sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan usaha PKL seperti di negara Malaysia, pemberian bantuan dan pinjaman kepada sektor informal dilakukan untuk memberikan kesempatan pada PKL untuk berkembang kearah sektor formal dan meningkatkan efisiensi bagi keberadaan PKL yang telah ada. Pola ini berhubungan erat dengan pihak lain seperti swasta, LSM dan lainnya.(McGee dan Yeung, 1977: 59-60).

4.2.3 Persepsi Pengunjung Terhadap Pola Pengelompokan Dagangan

Menurut responden pengunjung persepsi terhadap pengelompokan PKL dalam usahanya dapat dilihat pada Tabel IV.9 berikut:

Tabel IV.9
Pengelompokan Pedagang berdasarkan Persepsi Pengunjung

Zona	Pola Pengelompokan				Jumlah Sampel
	Blok-Blok Sejenis		Bercampur		
	Memudahkan pilihan	Mudah dicari konsumen	Mengurangi persaingan	Menarik niat pembeli	
ZONA 1					
Zona 1A	1	4	0	1	6
Zona 1B	3	13	1	6	23
Zona 1C	12	33	2	8	55
Zona 1D	7	5	2	4	18
Jumlah	23	55	5	19	102
Persentase (%)	22,55	53,92	4,90	18,63	100
ZONA 2					
Zona 2A	9	5	1	0	15
Zona 2B	17	29	14	4	64
Zona 2C	0	2	2	3	7
Jumlah	26	36	17	7	86
Persentase (%)	30,23	41,86	19,77	8,14	100
ZONA 3					
Zona 3A	1	10	10	3	24
Zona 3B	5	6	2	0	13
Zona 3C	0	9	3	0	12
Zona 3D	2	6	1	0	9
Zona 3E	0	3	1	0	4
Zona 3F	0	3	2	0	5
Jumlah	8	37	19	3	67
Persentase (%)	11,94	55,22	28,36	4,48	100
Total Seluruhnya	57	128	41	29	255
Total Persentase (%)	22,35	50,20	16,08	11,37	100

Sumber: Hasil tabulasi kuesioner, tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebesar (72,55%) pengunjung yang memilih pola pengelompokan pedagang secara sejenis dengan jenis dagangan yang sama atau di buat blok-blok sejenis. Dari pilihan tersebut 50,20% diantaranya dengan alasan mudah dicari konsumen dan 22,35% dengan alasan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mencari dan membeli barang dagangannya. Sedangkan total yang memilih pengelompokan bercampur hanya sebesar (27,45%) dengan alasan terbanyak sebesar 16,08% yaitu agar mengurangi persaingan antara pedagang yang sejenis dan 11,37% beralasan agar dapat menarik niat pembeli yang melewatinya. Yang dimaksud dengan jenis dagangan yang bercampur menurut pengunjung adalah dengan dagangan yang berlokasi dengan jenis dagangan lain yaitu misalnya pedagang makanan/minuman yang berdagang pada lokasi yang bersebelahan dengan jenis dagangan selain makanan/minuman misalkan dengan pakaian, agar disaat memilah dagangan PKL bisa langsung membeli makanan/minuman jika kehausan atau merasa lapar.

4.2.4 Persepsi Pengunjung Terhadap Penataan/Pengaturan

Dari hasil survai primer dari penyebaran kuesioner diketahui bahwa sebagian besar pengunjung memberikan persepsi bahwa perlu diadakan pengaturan PKL pada Kawasan Gasibu tersebut tiap hari minggu pagi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.10 berikut:

Tabel IV.10
Persepsi Pengunjung Terhadap Pengaturan PKL

Zona	Perlu Pengaturan				Jumlah Sampel
	Ya		Tidak		
	Lebih Teratur	Menarik Konsumen	Sudah rapi	Perlu biaya/tenaga	
ZONA 1					
Zona 1A	3	2	0	1	6
Zona 1B	16	5	2	0	23
Zona 1C	26	20	4	5	55
Zona 1D	10	6	1	1	18
Jumlah	55	33	7	7	102
Persentase (%)	53,92	32,35	6,86	6,86	100

Zona	Perlu Pengaturan				Jumlah Sampel
	Ya		Tidak		
	Lebih Teratur	Menarik Konsumen	Sudah rapi	Perlu biaya/tenaga	
ZONA 2					
Zona 2A	11	3	1	0	15
Zona 2B	28	24	3	9	64
Zona 2C	7	0	0	0	7
Jumlah	46	27	4	9	86
Persentase (%)	53,49	31,40	4,65	10,47	100
ZONA 3					
Zona 3A	12	5	2	5	24
Zona 3B	6	2	0	5	13
Zona 3C	5	2	1	4	12
Zona 3D	9	0	0	0	9
Zona 3E	1	3	0	0	4
Zona 3F	3	2	0	0	5
Jumlah	36	14	3	14	67
Persentase (%)	53,73	20,90	4,48	20,90	100
Total Seluruhnya	137	74	14	30	255
Total Persentase (%)	53,73	29,02	5,49	11,76	100

Sumber: Hasil tabulasi kuesioner, tahun 2012

Ternyata berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan pada responden pengunjung yang ditemui di lapangan, ternyata persepsi para pengunjung terhadap perlunya penataan/pengaturan adalah sangat besar. Sebagian besar responden (92,75%) PKL menganggap perlu diadakan pengaturan. Alasan utama mereka yang menginginkan pengaturan pada lokasi adalah sebagian besar (53,73%) agar lebih teratur rapi dan sebagian yang lain (29,02%) supaya dapat menarik konsumen sehingga konsumen akan lebih menyukai dan memiliki niat untuk membeli di PKL Kawasan Gasibu. Para pengunjung yang tidak menginginkan adanya pengaturan mengemukakan alasannya adalah bahwa tempat Gasibu yang ditempati PKL telah rapi dan teratur dan sebagian lagi menganggap pengaturan akan memerlukan biaya dan tenaga yaitu sebesar (11,76%).

Kemudian menurut para pengunjung, jika adanya pengaturan hal-hal yang perlu dilakukan penataan/pengaturan oleh pemerintah adalah seperti pada tabel IV.11 berikut:

Tabel IV.11
Hal-Hal Yang Perlu Diatur

Zona	Yang Perlu Diatur				Jumlah Sampel
	Jenis Dagangan	Sarana Dagang	Waktu	Tempat	
ZONA 1					
Zona 1A	0	3	0	3	6
Zona 1B	0	5	9	9	23
Zona 1C	1	23	19	12	55
Zona 1D	1	7	4	6	18
Jumlah	2	38	32	30	102
Persentase (%)	1,96	37,25	31,37	29,41	100
ZONA 2					0
Zona 2A	2	10	1	2	15
Zona 2B	5	18	20	21	64
Zona 2C	0	2	4	1	7
Jumlah	7	30	25	24	86
Persentase (%)	8,14	34,88	29,07	27,91	100
ZONA 3					0
Zona 3A	0	7	5	12	24
Zona 3B	6	2	1	4	13
Zona 3C	3	3	6	0	12
Zona 3D	0	5	3	1	9
Zona 3E	1	3	0	1	5
Zona 3F	0	2	1	2	5
Jumlah	10	22	16	20	68
Persentase (%)	14,71	32,35	23,53	29,41	100
Total Seluruhnya	19	90	73	74	256
Total Persentase (%)	7,42	35,16	28,52	28,91	100

Sumber: Hasil tabulasi kuesioner, tahun 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa menurut para pengunjung, hal yang perlu diatur adalah sarana dagang dan tempat usaha PKL, kemudian waktu dan jenis dagangan. Bagi pedagang pengaturan sarana dagang, tempat usaha, waktu serta jenis dagangan akan dapat menarik konsumen. Pengaturan tersebut diharapkan juga dapat memberikan nilai estetis sarana dagang para PKL yang berjualan di kawasan Gasibu dan memberikan kenyamanan baik bagi pedagang maupun pengunjung.

4.2.5 Persepsi Pengunjung Terhadap Fasilitas Yang Perlu Ditambah

Sedangkan sarana dan prasarana yang ada menurut pengunjung masih belum cukup, seperti listrik, tempat parkir, air bersih, tempat sampah pada lokasi kajian belum dapat memenuhi kebutuhan kegiatan PKL, setidaknya dari hasil survai primer seperti terlihat pada Tabel IV.12 berikut:

Tabel IV.12
Fasilitas Umum Yang Perlu Ditambah

Zona	Yang Perlu ditambah/dibangun					Jumlah Sampel
	Listrik	Air bersih	Tempat sampah	Parkir	Toilet	
ZONA 1						
Zona 1A	0	0	2	1	3	6
Zona 1B	1	2	4	7	9	23
Zona 1C	0	21	9	7	18	55
Zona 1D	0	1	4	6	7	18
Jumlah	1	24	19	21	37	102
Persentase (%)	0,98	23,53	18,63	20,59	36,27	100
ZONA 2						
Zona 2A	0	1	2	7	5	15
Zona 2B	4	18	21	19	2	64
Zona 2C	0	3	1	1	2	7
Jumlah	4	22	24	27	9	86
Persentase (%)	4,65	25,58	27,91	31,40	10,47	100
ZONA 3						
Zona 3A	0	2	8	10	4	24
Zona 3B	1	0	2	7	3	13
Zona 3C	0	1	1	6	4	12
Zona 3D	0	0	5	1	3	9
Zona 3E	0	0	2	1	1	4
Zona 3F	0	2	1	1	1	5
Jumlah	1	5	19	26	16	67
Persentase (%)	1,49	7,46	28,36	38,81	23,88	100
Total Seluruhnya	6	51	62	74	62	255
Total Persentase (%)	2,35	20,00	24,31	29,02	24,31	100

Sumber: Hasil tabulasi kuesioner, tahun 2012

Pada tabel diatas menurut responden pengunjung, fasilitas yang perlu ditambah adalah air bersih, tempat sampah, tempat parkir serta toilet. Pada saat ini sarana tempat sampah dan toilet umum belum mencukupi kebutuhan dari adanya kegiatan PKL Kawasan Gasibu. Sedangkan menurut pengunjung pada Zona 1 fasilitas umum yang perlu ditambah adalah toilet dan air bersih, dimana responden

memilih fasilitas tersebut masing-masing sebesar 36,27% dan 23,53% karena tempat parkir telah cukup tersedia serta tempat sampah telah ada di tiap-tiap taman dengan 2 jenis tempat sampah yang dipisahkan yaitu tempat sampah untuk sampah organik dan anorganik, dan tiap hari petugas Dinas Kebersihan telah mengangkut sampah yang ada. Sedangkan pada Zona 2 kebutuhan sarana yang harus dikembangkan adalah pengalokasian tempat parkir yang strategis dan sarana tempat sampah. karena zona ini sangat rawan kemacetan akibat parkir kendaraan yang sembarangan khususnya pada ruas jalan Surapati. begitu pula pada zona 3 sebagian besar responden menyatakan fasilitas yang perlu ditambah adalah tempat parkir dan fasilitas tempat sampah.

4.3 Analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Dalam menentukan alternatif prioritas penataan PKL di Kawasan Gasibu digunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Metode ini memungkinkan peneliti dalam membuat keputusan yang efektif melalui penyederhanaan dan percepatan proses pengambilan keputusan secara alamiah.

Tujuan dari metode ini yaitu untuk menentukan bobot dalam menentukan ranking dari komoditas yang paling penting, dalam analisis dengan metode AHP ini terdiri dari 4 (empat) tahapan utama, yaitu :

1. Penentuan kriteria
2. Perumusan hirarki
3. Penilaian tingkat kepentingan
4. Penentuan skala prioritas

Seperti yang telah dikemukakan dalam bagian sebelumnya, studi ini menggunakan 16 (enam belas) responden para ahli yang terdiri dari pihak-pihak yang berkaitan langsung (*stakeholders*) dengan masalah penanganan PKL di Kawasan Gasibu Bandung. Adapun stakeholders yang dimaksud meliputi : aparat pemerintah seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung, Satpol PP, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi.

Hasil analisis ini adalah seperangkat kriteria yang telah dinilai dan berperan dalam menentukan Prioritas Arahan Penataan PKL. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, langkah – langkah yang diambil dalam metode AHP ada 6 tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- ✓ Menentukan kriteria yang digunakan dalam menentukan Prioritas penataan PKL.
- ✓ Menyusun hirarki kriteria penilaian menurut pengelompokan kriteria yang bersangkutan, kemudian dijabarkan kedalam bentuk hirarki analitik yang terdiri dari beberapa level.
- ✓ Menilai perbandingan kepentingan kriteria penilaian oleh pihak – pihak yang telah mengenal permasalahan PKL. Nilai akhir yang diambil adalah hasil kesepakatan semua wakil berdasarkan kesepakatan semua wakil berdasarkan kepentingan kriteria pada skala pembandingan.
- ✓ Menghitung nilai bobot kepentingan kriteria tersebut dengan menggunakan bantuan program *Expert Choise*. Hasil pembobotan ini selanjutnya diuji konsistensinya pada batas toleransi $<0,1$, atau nilai CR (*Consistency Ratio*) $<0,1$. Sehingga menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap metode yang digunakan.
- ✓ Menentukan arahan prioritas untuk penanganan permasalahan PKL di Kawasan Gasibu Kota Bandung.

Total skor masing – masing prioritas penanganan untuk semua faktor penilai, merupakan hasil dari pengolahan kuesioner dengan menggunakan metode AHP. Untuk lebih jelasnya, tahapan analisis tersebut akan dijelaskan pada bahasan berikut ini.

4.3.1 Penentuan Kriteria

Dari hasil wawancara dan diskusi dengan para stakeholder, dengan memperhatikan uraian pustaka yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya didapatkan beberapa faktor/aspek yang harus dipertimbangkan dalam menyusun Arahan penataan PKL pada Tabel IV.13 :

Tabel IV.13
Faktor, Sub faktor dan Indikator untuk Alternatif Arahan Penataan PKL

Faktor	Sub Faktor	Indikator	Alternatif
Faktor Lokasional	Pemugaran atau Relokasi	Dipindahkan/Pengembangan di Lokasi baru	Prioritas Arahan Penataan PKL
	Stabilisasi atau Pengaturan	Peruntukan dalam ruang terbuka (open market)	
		Pengendalian/Pembatasan dan Pengurangan Jumlah PKL dalam Kawasan Gasibu	
		Pembebasan atau penutupan jalan-jalan tertentu	
		Pemanfaatan bagian tertentu dari jalan atau trotoar	
Penghapusan atau Removal	Menghilangkan/Penertiban aktifitas PKL pada ruang fungsional		
Faktor Struktural	Perijinan	Legalisasi bagi PKL	
	Pembinaan	Pembinaan/advokasi Sosial (termasuk Kesehatan dan Agama) terhadap PKL	
	Peningkatan Akses Permodalan	Bantuan atau pinjaman	
Faktor Aksesibilitas	Pola Pengelompokan PKL	Pola Berkelompok dengan yang dagangan yang sejenis	
		Pola Bercampur dengan jenis dagangan lain	
	Pola Pelayanan PKL	Pengaturan Waktu berjualan	
		Pangaturan Sarana Dagangan	
Sirkulasi	Memberikan Arahan jalur Keluar-Masuk Kawasan		
Faktor Kenyamanan	Kualitas kebersihan lingkungan	Pengadaan Tempat sampah	
	Ketersediaan sarana Penunjang Kegiatan	Pengadaan/peningkatan Utilitas air bersih	
		Pengalokasian tempat parkir	
		Pengadaan MCK/Toilet Umum	
Keselamatan & Keamanan	Dimensi Ruang	Pengaturan/Pemanfaatan sub ruang & komponen yang cukup	
	Manajemen Keselamatan dan kemanan	Antisipasi dan Pengawasan keamanan Kawasan oleh pihak keamanan	

Sumber : Wawancara Para ahli dan beberapa sumber pustaka, Tahun 2012

Beberapa kriteria/faktor yang umumnya dipertimbangkan dalam perumusan Prioritas Arahan Penataan PKL di Kawasan Gasibu Kota Bandung adalah :

- 1. Faktor Aspek Fungsional** : Misalnya pemanfaatan fungsi ruang terbuka publik oleh aktivitas temporer seperti Pasar Kaget Gasibu harus sesuai dengan fungsi peruntukan sub-sub ruang. Untuk Menghindari malfungsi tersebut perlunya tindakan seperti Pemugaran atau Relokasi PKL, Stabilisasi atau Pengaturan PKL ataupun Penghapusan atau Removal PKL secara permanen. *Kepala Bidang Penertiban Satpol PP Kota Bandung*). Hal tersebut dimaksudkan agar tercipta ketertiban dan menghindari konflik dan mencegah terjadinya kemacetan dan kesemrawutan yang ditimbulkan dan tidak terganggunya aktifitas/ketertiban masyarakat. (McGee dan Yeung 1977: 42-52)
- 2. Aspek Struktural PKL** : Misalnya dapat dilakukan pengendalian dengan pembinaan terhadap kualitas polapikir para pedagang, serta pentingnya pemberian izin usaha kepada kelompok PKL, Perijinan bagi aktivitas PKL dalam melakukan usahanya didasari atas pertimbangan memudahkan dalam pengaturan, pengawasan dan pembatasan jumlah serta membantu dalam penarikan retribusi. (*McGee dan Yeung, 1977: 56-60*)
- 3. Faktor Aksesibilitas** : Misalnya untuk memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk mencapai di dalam ruang (internal) dan kawasan sekitarnya (eksternal) ruang publik. maka diperlukan penataan komponen untuk meningkatkan aksesibilitas dimaksudkan, dengan mengatur Pola Pengelompokan PKL, Pola Pelayanan PKL serta pengaturan Sirkulasi dalam Kawasan Gasibu.
- 4. Faktor Kenyamanan** : pemenuhan kebutuhan pengunjung Kawasan Gasibu untuk beraktivitas secara aktif dan beraktivitas pasif perlu tersedia pula sarana penunjang seperti tempat parkir, juga sarana utilitas lingkungan Seperti Toilet, tempat sampah dan air bersih demi kenyamanan lingkungan dengan adanya peningkatan kualitas kebersihan. Kenyamanan juga harus didapatkan oleh pihak-pihak di sekitar kawasan, terutama

karena mereka teridentifikasi sebagai pejalan kaki, pengendara kendaraan mengalami eksternalitas negatif akibat adanya aktivitas temporer Pasar Kaget Gasibu.

5. **Faktor Keamanan & Keselamatan** : Misalnya untuk menjamin bahwa pedagang maupun pengunjung terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan jiwa yang disebabkan oleh penataan komponen yang kurang serasi. Terkait dengan jenis aktivitas PKL yang teridentifikasi menarik jumlah pengunjung yang besar sehingga mengakibatkan berdesak-desakan. Pengaturan dan panduan pemanfaatan sub ruang beserta komponen agar tersedia cukup ruang agar tidak berdesak-desakan/berbenturan. Selain itu untuk memberikan rasa aman baik bagi pengunjung sehingga terhindar dari terjadinya tindakan kriminal atau kejahatan. (*Ari Maravian, 2009,87*)

4.3.2 Perumusan Hirarki

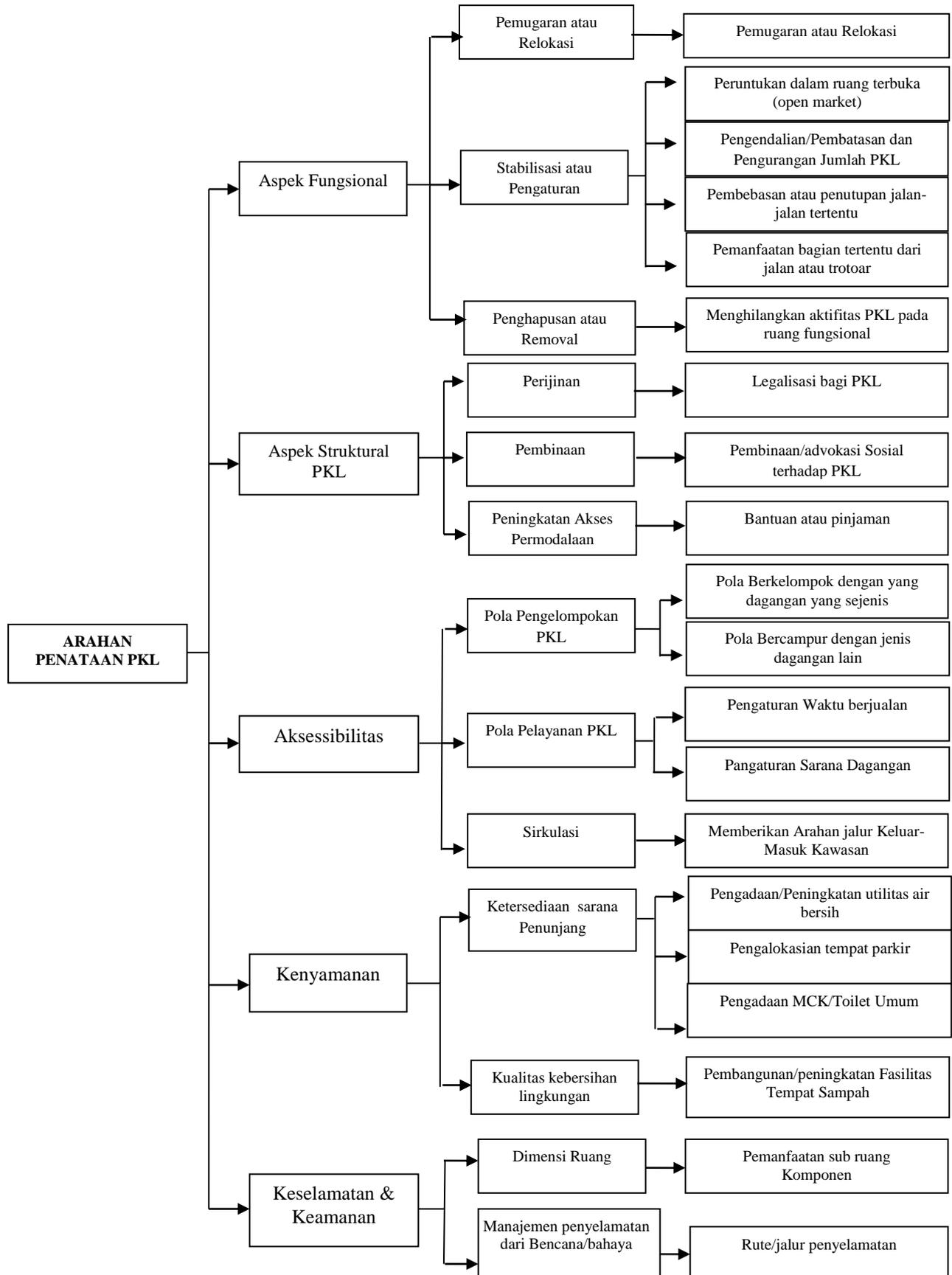
Setelah menentukan kriteria, langkah berikutnya adalah merumuskan hirarki yang akan digunakan dalam menentukan Arahan Penataan PKL Kawasan Gasibu. Hirarki yang dibentuk merupakan model yang menyederhanakan analisa yang kompleks. Pembentukan hirarki tidak ada aturan khusus, namun yang terpenting adalah elemen yang tergabung dalam satu tingkatan (level).

Keseluruhan struktur hirarki yang terbentuk dalam studi ini terdiri dari 4 (lima) level/tingkatan. Level/hirarki pertama terdiri dari 5 (lima) kriteria yaitu, Aspek Fungsional, Aspek Struktural, Aksesibilitas, Kenyamanan, Keselamatan & Keamanan. Level/hirarki kedua terdiri dari 13 (tiga belas) sub kriteria yaitu Pemugaran atau Relokasi, Stabilisasi atau Pengaturan, Penghapusan atau Removal Perijinan, Pembinaan, Peningkatan Akses Permodalan, Pola Pengelompokan PKL, Pola Pelayanan PKL, Sirkulasi, Ketersediaan sarana Penunjang Kegiatan, Kualitas kebersihan lingkungan, Dimensi Ruang, Manajemen Keselamatan dan kemanan. Level/hirarki ketiga terdiri dari 20 (delapan) indikator yaitu Dipindahkan/Pengembangan di Lokasi baru, Peruntukan dalam ruang terbuka (open market), Pengendalian/Pembatasan dan Pengurangan Jumlah PKL dalam

Kawasan Gasibu, Pembebasan atau penutupan jalan-jalan tertentu, Pemanfaatan bagian tertentu dari kawasan dan jalan atau trotoar, Menghilangkan aktifitas PKL pada ruang fungsional, Legalisasi bagi PKL, Pembinaan/advokasi Sosial (termasuk Kesehatan dan Agama) terhadap PKL, Bantuan atau pinjaman, Pola Berkelompok dengan yang dagangan yang sejenis, Pola Bercampur dengan jenis dagangan lain, Pengaturan Waktu berjualan, Pangaturan Sarana Dagangan, Memberikan Arahkan jalur, Keluar-Masuk Kawasan, Pembangunan/peningkatan Fasilitas penunjang kegiatan seperti pengalokasian tempat parkir, Pengadaan/peningkatan, Utilitas air bersih, Pengadaan Tempat sampah, Pengadaan MCK/Toilet Umum, Pengaturan/Pemanfaatan sub ruang & komponen yang cukup, Antisipasi dan Pengawasan keamanan Kawasan oleh pihak keamanan. Untuk yang terakhir yaitu dengan menentukan Alternatif Arahkan Penataan PKL di Kawasan Gasibu Bandung yang di prioritaskan.

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai perumusan hirarki dapat dilihat pada Gambar 4.3 pohon hirarki dibawah ini :

Gambar 4.1 Pohon Hirarki Kriteria Penataan PKL Kawasan Gasibu



4.3.3 Penilaian Tingkat Kepentingan

Setelah memperoleh struktur hirarki bagi Alternatif Arahan Penataan PKL di Kawasan Gasibu Bandung, langkah berikutnya adalah proses penilaian terhadap tingkat kepentingan kriteria yang sudah ditentukan..

Hal yang paling penting dalam penilaian tingkat kepentingan kriteria adalah pihak penilai. Sesuai dengan kaidah dalam analisis AHP, penilaian didasarkan pada persepsi manusia yang memiliki wawasan dan intelektual. Dalam studi ini yang dijadikan responden pakar untuk memberikan penilaian terhadap kriteria adalah sebagai berikut:

- Ahli Perencanaan Kota dari Bappeda
- Ahli Tata ruang
- Ahli perekonomian dan pasar
- Ahli Pariwisata
- Satpol PP
- praktisi sektor informal

Proses penilaian tingkat kepentingan ini dilakukan dengan bantuan program *Expert Choice*. Dalam penilaian tingkat kepentingan ini dihasilkan nilai bobot untuk masing-masing kriteria. Sesuai dengan hirarki yang telah disusun, maka pada level pertama dilakukan analisis berbagai faktor yang dipertimbangkan dalam Arahan Penataan PKL di Kawasan Gasibu. Hasil perhitungan matriks *pairwise* dari 16 (enam belas) jawaban responden dengan metode perhitungan *geometric mean*, dapat dilihat pada Tabel IV.14.

Tabel IV.14 Matriks *Pairwise* Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penataan PKL Kawasan Gasibu

Faktor	Aspek Fungsional	Aspek Struktural	Aksesibilitas	Kenyamanan	Keselamatan & Keamanan
Fungsional	1,000	3,625	2,552	2,315	1,370
Struktural	0,276	1,000	0,969	0,477	0,328
Aksesibilitas	0,392	1,032	1,000	1,500	0,484
Kenyamanan	0,432	2,096	0,667	1,000	0,808
Keselamatan & Keamanan	0,730	3,052	2,066	1,237	1,000
Jumlah	2,830	10,806	7,253	6,529	3,990

Sumber: Hasil Analisis, 2012

Matriks tersebut menunjukkan tingkat kepentingan setiap faktor terhadap faktor lainnya. Nilai-nilai tersebut merupakan hasil rata-rata dari penilaian 16 responden. Hasil perhitungan menemukan bahwa besarnya koefisien Faktor Aspek Fungsional terhadap Faktor Aspek Struktural sebesar 3,625, terhadap Faktor Aksesibilitas sebesar 2,552, terhadap Faktor Kenyamanan sebesar 2,315, serta terhadap faktor Keselamatan & Keamanan sebesar 1,370 yang menggambarkan bahwa responden (*stakeholders*) menganggap Faktor Fungsional merupakan aspek yang lebih penting bila dibandingkan dengan Faktor Aspek Struktural, Aksesibilitas, Kenyamanan, serta Keselamatan & Keamanan..

Sedangkan nilai koefisien terbesar dimiliki oleh Faktor Keselamatan & Keamanan jika dibandingkan dengan Faktor Struktural, yaitu sebesar 3,252. Hal ini menunjukkan bahwa Faktor Keselamatan & Keamanan merupakan aspek yang sangat penting bila dibandingkan dengan Faktor Struktural. Disamping itu, koefisien Faktor Keselamatan & Keamanan terhadap Faktor Aksesibilitas juga cukup besar, yaitu 2,066. Besarnya koefisien Faktor Kenyamanan terhadap Faktor Aspek Struktural sebesar 2,096, menunjukkan Faktor Kenyamanan juga lebih penting dari Faktor Struktural. Secara umum responden menganggap bahwa Faktor Fungsional, Faktor Kenyamanan serta faktor Keselamatan & Keamanan merupakan aspek yang lebih penting dibandingkan dengan Faktor Struktural dan Faktor Aksesibilitas.

Setelah diperoleh matriks *pairwise* seperti dalam Tabel IV.14, Selanjutnya mencari Nilai *vektor eigen* dengan cara membagi unsur-unsur pada tiap kolom dengan jumlah kolom yang bersangkutan, maka diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai *vektor eigen* dihasilkan dari rata-rata bobot relatif untuk setiap baris. Hasilnya dapat pada Tabel IV.15 berikut ini:

Tabel IV.15
Matriks Faktor Pembobotan Kriteria untuk Semua Kriteria yang Dinormalkan

Faktor	Aspek Fungsional	Aspek Struktural	Aksesibilitas	Kenyamanan	Keselamatan & Keamanan	Bobot Wi	Vector Eigen (yang dinormalkan)
	a	b	c	d	e	$f = (axbxcxdxe)^{1/5}$	f / Jumlah Bobot Wi
Fungsional	1,000	3,625	2,552	2,315	1,370	1,965	0,353
Struktural	0,276	1,000	0,969	0,477	0,328	0,530	0,095
Aksesibilitas	0,392	1,032	1,000	1,500	0,484	0,783	0,141
Kenyamanan	0,432	2,096	0,667	1,000	0,808	0,866	0,156
Keselamatan & Keamanan	0,730	3,052	2,066	1,237	1,000	1,416	0,255
Jumlah	2,830	10,806	7,253	6,529	3,990	5,560	1,000

Sumber: Hasil Analisis, 2012

Hasil penghitungan matriks Faktor Pembobotan Kriteria untuk Semua Kriteria yang dinormalkan dalam penentuan alternatif penataan PKL Kawasan Gasibu, menunjukkan bahwa Faktor Fungsional menjadi faktor/aspek yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam menangani PKL Kawasan Gasibu, dengan bobot sebesar 35,3 persen. Faktor prioritas kedua yang juga memiliki bobot cukup tinggi adalah Faktor Keselamatan & Keamanan yang memiliki bobot 25,5%, disusul oleh Faktor Kenyamanan yang memiliki bobot 15,6%. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama memiliki bobot lebih dari 15 persen (secara rata-rata untuk kelima faktor), hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebutlah yang memiliki prioritas tinggi dalam penataan PKL di Kawasan Gasibu Bandung. Sedangkan Faktor aksesibilitas dan Faktor Struktural masing-masing memiliki bobot yang cukup rendah (dibawah rata-rata 15 persen), dengan bobot masing-masing 14,1% dan 9,5%.

Selanjutnya dilakukan pengujian konsistensi jawaban dengan menghitung rasio konsistensi (*consistency ratio/CR*), dengan terlebih dahulu mencari nilai *eigen maksimum* (λ maksimum) didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan *vektor eigen* atau diperoleh dari nilai rata-rata konsistensi vektor. Nilai eigen maksimum yang dapat diperoleh adalah 5,084.

$$\lambda \text{ maks} = (2,830 \times 0,353) + (10,806 \times 0,095) + (7,253 \times 0,141) + (6,529 \times 0,156) + (3,990 \times 0,255) = \mathbf{5,084}$$

Maka dengan menggunakan persamaan 4.1, dengan $n = 5$, didapatkan indeks inkonsistensi (CI) sebesar 0,021.

$$CI = \frac{(\lambda_{max} - n)}{(n - 1)} = \frac{(5,084 - 5)}{(5 - 1)} = \frac{0,084}{4} = 0,021 \quad [4.1]$$

di mana:

n = jumlah kriteria, bukan responden

λ_{maks} = Nilai eigen terbesar dari matriks berordo n

Selanjutnya dengan menggunakan persamaan 4.2, dengan indeks random (RI) sebesar 1,12, maka didapatkan rasio konsistensi (CR) sebesar 0,0189 atau 1,89 %, atau masih dibawah batas toleransi, yaitu 10 persen.

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,021}{1,12} = 0,0189 = 1,89 \% < 10\% \quad [4.2]$$

di mana: RI = *Random Index* (karena nilai $n=5$, maka $RI= 1,12$)

Dengan demikian jawaban responden dianggap konsisten dan dapat disusun *matriks priority*. Namun sebelumnya untuk mengetahui konsistensi jawaban (consistency ratio/CR) pada level kedua dan ketiga, maka dilakukan perhitungan pengujian konsistensi seluruh jawaban dengan perhitungan yang sama pada perhitungan rasio konsistensi level pertama, seluruh hasil perhitungan tersebut dapat terlihat pada Tabel IV.16 dan Tabel IV.17 dibawah ini.

Tabel IV.16
Rasio Konsistensi (CR) Level Pertama Dan Level Kedua

Kriteria	λ	n	-n	n-1	CI	RI	CR
Faktor	5,084	5	0,084	4	0,021	1,12	0,0189
Fungsional	3,003	3	0,003	2	0,008	0,58	0,0030
Struktural	3,002	3	0,002	2	0,001	0,58	0,0017
Aksesibilitas	3,029	3	0,029	2	0,015	0,58	0,0254
Kenyamanan	2,000	2	0,000	1	0	0	-
Keselamatan & Keamanan	2,000	2	0,000	1	0	0	-

Sumber: Hasil Analisis, 2012

Tabel IV.17
Rasio Konsistensi (CR) Level Ketiga

indikator	λ	n	-n	n-1	CI	RI	CR
Faktor	5,084	5	0,084	4	0,021	1,12	0,0189
Stabilisasi dan Pengaturan	4,101	4	0,101	3	0,034	0,900	0,0374
Ketersediaan sarana Penunjang	3,104	3	0,104	2	0,052	0,580	0,0897

Sumber: Hasil Analisis, 2012

Secara keseluruhan rasio konsistensi (CR) baik di level pertama dan level kedua serta level ketiga memiliki nilai dibawah 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden, secara rata-rata konsisten dalam menentukan pilihan-pilihan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya, dalam menentukan strategi penanganan PKL di Kawasan Gasibu. Hal ini juga menunjukkan bahwa *stakeholders* yang dipilih dan digunakan dalam studi ini, benar-benar mengetahui dan memahami masalah dalam penentuan arahan penataan PKL di Kawasan Gasibu.

Selanjutnya dalam Tabel IV.18 Nilai dari tiap elemen yang dihasilkan menunjukkan prioritas preferensi responden terhadap elemen yang lain. Perhitungan dilanjutkan untuk nilai rata-rata baris dari Faktor Pembobotan Kriteria tersebut yang merupakan nilai bobot prioritas lokal (*local priority*) dari tiap faktor. Dari berikut memperlihatkan nilai bobot faktor pada level pertama, nilai bobot faktor pada level kedua dan nilai bobot faktor level ketiga sesuai dengan struktur hirarki penataan PKL Kawasan Gasibu yang dilakukan dengan Program/perangkat lunak *Expert Choice*.

Tabel IV.18
Nilai Bobot Faktor Arahan Penataan PKL Kawasan Gasibu

No	Kriteria/Sub Kriteria	Bobot	Prioritas
Hirarki I			
1	Fungsional	0,305	1
2	Struktural	0,081	5
3	Aksessibilitas	0,145	4
4	Kenyamanan	0,191	3
5	Keselamatan & Keamanan	0,274	2
Hirarki II			
1	Pemugaran atau Relokasi	0,081	5
2	Stabilisasi atau Pengaturan	0,196	1
3	Penghapusan atau Removal	0,029	11
4	Perijinan	0,022	12
5	Pembinaan	0,045	8
6	Peningkatan Akses Permodalaan	0,014	13
7	Pola Pengelompokan PKL	0,061	7
8	Pola Pelayanan PKL	0,044	9
9	Sirkulasi	0,039	10
10	Kualitas kebersihan lingkungan	0,062	6
11	Ketersediaan Sarana Penunjang Kegiatan	0,130	3

No	Kriteria/Sub Kriteria	Bobot	Prioritas
12	Dimensi Ruang	0,147	2
13	Manajemen penyelamatan dari Bencana/bahaya	0,127	4
Hirarki III			
1	Dipindahkan/Pengembangan di Lokasi baru	0,081	4
2	Peruntukan dalam ruang terbuka (open market	0,070	5
3	Pengendalian/Pembatasan dan Pengurangan Jumlah PKL dalam Kawasan Gasibu	0,082	3
4	Pembebasan atau penutupan jalan-jalan tertentu	0,021	19
5	Pemanfaatan bagian tertentu dari kawasan dan jalan atau trotoar	0,023	17
6	Menghilangkan aktifitas PKL pada ruang fungsional	0,027	15
7	Legalisasi bagi PKL	0,022	
8	Pembinaan/advokasi Sosial (termasuk Kesehatan dan Agama terhadap PKL	0,045	10
9	Bantuan atau pinjaman	0,014	21
10	Pola Berkelompok dengan yang dagangan yang sejenis	0,043	11
11	Pola Bercampur dengan jenis dagangan lain	0,018	20
12	Pengaturan Waktu berjualan	0,023	16
13	Pangaturan Sarana Dagangan	0,021	18
14	Memberikan Arahan jalur Keluar-Masuk Kawasan	0,039	12
15	Pembangunan/peningkatan Fasilitas penunjang kegiatan seperti pengalokasian tempat parkir	0,062	8
16	Pengadaan/peningkatan Utilitas air bersih	0,039	13
17	Pengadaan Tempat sampah	0,056	9
18	Pengadaan MCK/Toilet Umum	0,035	14
19	Pengaturan/Pemanfaatan sub ruang &komponen yang cukup	0,147	1
20	Antisipasi dan Pengawasan keamanan Kawasan oleh pihak keamanan	0,127	2

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2012

Dari Tabel IV.18 menunjukkan bahwa menurut persepsi responden untuk menangani permasalahan PKL di Kawasan Gasibu Kota Bandung, faktor yang paling penting adalah Faktor fungsional, yang mencakup pemugaran atau relokasi, stabilisasi atau pengaturan, serta penghapusan atau removal. Faktor ini menjadi penting, karena responden menganggap aspek fungsional merupakan akar dari penanganan permasalahan PKL dan sangat berpengaruh dalam melakukan tindakan tindakan tegas dalam pengendalian maupun penataan PKL.

Faktor keselamatan dan keamanan merupakan faktor penting kedua, karena responden menganggap bahwa perlunya ketegasan untuk kepentingan kemandirian dan keselamatan bersama baik pedagang maupun pengunjung. Faktor ini meliputi dimensi ruang dan manajemen penyelamatan dari bencana/bahaya,

dimana faktor keselamatan merupakan suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu diperlukan adanya tindakan pencegahan.

Ketersediaan sarana Penunjang Kegiatan PKL dan Kualitas kebersihan lingkungan pada kawasan Gasibu merupakan unsur penting dalam Faktor Kenyamanan. menyediakan sarana dan prasarana serta manajemen dalam peningkatan kualitas lingkungan dimaksudkan untuk pengembangan Kawasan yang berkelanjutan dan memberi kesan pada PKL Kawasan Gasibu sebagai salah satu tempat wisata belanja yang baik, bersih dan indah.

Faktor aksesibilitas memiliki unsur Pola Pengelompokan PKL, Pola Pelayanan PKL dan Sirkulasi menjadi faktor penting berikutnya. Kecenderungan PKL yang menempati lokasi secara tidak teratur/sembarangan tempat dan terkesan semrawut merupakan hal yang kurang baik maka aksesibilitas menjadi tolok ukur kepuasan dan kemudahan dalam kegiatan wisata belanja para pengunjung.

4.3.4 Penentuan Skala Prioritas

Setelah diketahui bobot level pertama, bobot level kedua, bobot level ketiga, maka langkah selanjutnya adalah menghitung bobot nilai final yang merupakan perkalian antara bobot nilai pada level pertama dengan bobot nilai pada level kedua dan bobot level ketiga. Bobot fina tersebut akan menentukan mana arahan penataan PKL yang diurutkan sesuai skala prioritasnya. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel IV.19 berikut ini.

Tabel IV.19
Bobot Level Pertama, Level Kedua dan Level Ketiga untuk Alternatif Penataan PKL

LEVEL PERTAMA		LEVEL KEDUA			LEVEL KETIGA			BOBOT FINAL	
Faktor	Bobot lokal	Kriteria	Bobot lokal	Bobot global	Subkriteria	Bobot lokal	Bobot global		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e = b x d)	(f)	(g)	(h)	(i = g x h)	(j= i x 100%)
Aspek Fungsional	0,305	Pemugaran atau Relokasi	0,081	0,0247	Dipindahkan/Pengembangan di Lokasi baru	0,081	0,0066	0,000531	0,0531
		Stabilisasi atau Pengaturan	0,196	0,0598	Peruntukan dalam ruang terbuka (open market)	0,070	0,0137	0,000960	0,0960
					Pengendalian/Pembatasan dan Pengurangan Jumlah PKL dalam Kawasan Gasibu	0,082	0,0161	0,001318	0,1318
					Pembebasan atau penutupan jalan-jalan tertentu	0,021	0,0041	0,000086	0,0086
		Pemanfaatan bagian tertentu dari kawasan dan jalan atau trotoar	0,023	0,0045	0,000104	0,0104			
Penghapusan atau Removal	0,029	0,0088	Menghilangkan aktifitas PKL pada ruang fungsional	0,027	0,0008	0,000021	0,0021		
Aspek Struktural	0,081	Perijinan	0,022	0,0018	Legalisasi bagi PKL	0,022	0,0005	0,000011	0,0011
		Pembinaan	0,045	0,0036	Pembinaan/advokasi Sosial (termasuk Kesehatan dan Agama) terhadap PKL	0,045	0,0020	0,000091	0,0091
		Peningkatan Akses Permodalan	0,014	0,0011	Bantuan atau pinjaman	0,014	0,0002	0,000003	0,0003
Aksesibilitas	0,145	Pola Pengelompokan PKL	0,061	0,0088	Pola Berkelompok dengan yang dagangan yang sejenis	0,043	0,0026	0,000113	0,0113
					Pola Bercampur dengan jenis dagangan lain	0,018	0,0011	0,000020	0,0020
		Pola Pelayanan PKL	0,044	0,0064	Pengaturan Waktu berjualan	0,023	0,0010	0,000023	0,0023
					Pangaturan Sarana Dagangan	0,021	0,0009	0,000019	0,0019
Sirkulasi	0,039	0,0057	Memberikan Arahan jalur Keluar-Masuk Kawasan	0,039	0,0015	0,000059	0,0059		

LEVEL PERTAMA		LEVEL KEDUA			LEVEL KETIGA			BOBOT FINAL	
Faktor	Bobot lokal	Kriteria	Bobot lokal	Bobot global	Subkriteria	Bobot lokal	Bobot global		
Kenyamanan	0,191	Kualitas kebersihan lingkungan	0,062	0,0118	Pengadaan Tempat sampah	0,062	0,0038	0,000238	0,0238
		Ketersediaan sarana Penunjang Kegiatan	0,13	0,0248	Pengadaan/peningkatan Utilitas air bersih	0,039	0,0051	0,000198	0,0198
					Pengalokasian tempat parkir	0,056	0,0073	0,000408	0,0408
					Pengadaan MCK/Toilet Umum	0,035	0,0046	0,000159	0,0159
Keselamatan & Keamanan	0,274	Dimensi Ruang	0,147	0,0403	Pengaturan/Pemanfaatan sub ruang &komponen yang cukup	0,147	0,0216	0,003177	0,3177
		Manajemen penyelamatan dari Bencana/bahaya	0,127	0,0348	Antisipasi dan Pengawasan keamanan Kawasan oleh pihak keamanan	0,127	0,0161	0,002048	0,2048

Sumber: Hasil Analisis, 2012

Dari hasil Penggabungan tersebut dihasilkan bobot final (prioritas global). Hasil perhitungan bobot final dari Arahan Penataan PKL di Kawasan Gasibu, secara lengkap dan diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil pada Tabel IV.20 berikut ini.

Tabel IV.20
Bobot Final Alternatif Penataan PKL

No.	Alternatif Arahan	Bobot Final (%)	Rangking
1.	Pengaturan/Pemanfaatan sub ruang &komponen yang cukup	0,317652	1
2.	Antisipasi dan Pengawasan keamanan Kawasan oleh pihak keamanan	0,204838	2
3.	Pengendalian/Pembatasan dan Pengurangan Jumlah PKL dalam Kawasan Gasibu	0,131790	3
4.	Peruntukan dalam ruang terbuka (open market)	0,096040	4
5.	Dipindahkan/Pengembangan di Lokasi baru	0,053144	5
6.	Pengalokasian tempat parkir	0,040768	6
7.	Pengadaan Tempat sampah	0,023833	7
8.	Pengadaan/peningkatan Utilitas air bersih	0,019773	8
9.	Pengadaan MCK/Toilet Umum	0,015925	9
10.	Pola Berkelompok dengan yang dagangan yang sejenis	0,011279	10
11.	Pemanfaatan bagian tertentu dari kawasan dan jalan atau trotoar	0,010368	11
12.	Pembinaan/advokasi Sosial (termasuk Kesehatan dan Agama) terhadap PKL	0,009113	12
13.	Pembebasan atau penutupan jalan-jalan tertentu	0,008644	13
14.	Memberikan Arahan jalur Keluar-Masuk Kawasan	0,005932	14
15.	Pengaturan Waktu berjualan	0,002328	15
16.	Menghilangkan/Penertiban aktifitas PKL pada ruang fungsional	0,002114	16
17.	Pola Bercampur dengan jenis dagangan lain	0,001976	17
18.	Pangaturan Sarana Dagangan	0,001940	18
19.	Legalisasi bagi PKL	0,001065	19
20.	Bantuan atau pinjaman	0,000274	20

Sumber: Hasil Analisis, 2012

Menurut persepsi responden, alternatif Pengaturan/Pemanfaatan sub ruang & komponen yang cukup sangat berpengaruh dalam penentuan prioritas Arahan penataan PKL di kawasan Gasibu Bandung, yaitu dengan bobot nilai terbesar 0,003177 atau 0,318 persen, yang merupakan variabel pendukung dari Faktor Dimensi Ruang pada level kedua dan Faktor Keselamatan & Keamanan pada level pertama. Hal ini menunjukkan bahwa karena memang faktor pengaturan

sub-sub ruang yang dinilai sangat berperan penting oleh berbagai pihak untuk menata perkembangan usaha PKL di Kawasan Gasibu Bandung.

Rangking kedua adalah alternatif Antisipasi dan Pengawasan keamanan Kawasan oleh pihak keamanan yang merupakan variabel dari Faktor Manajemen Keselamatan dan Keamanan, dengan bobot sebesar 0,20 persen. Hal ini menggambarkan bahwa persepsi responden lebih mengutamakan tindakan keselamatan dan keamanan baik bagi pengunjung dan pedagang, dimana sering terjadinya kasus kriminal maupun premanisme di kawasan Gasibu sebagai langkah pencegahan (tindakan *preventif*) tindak kejahatan di tempat keramaian.

Alternatif Pembatasan/Pengurangan Jumlah PKL dalam Kawasan Gasibu dan Peruntukan dalam ruang terbuka (*open market*) menjadi pilihan penting berikutnya, yaitu dengan bobot masing-masing sebesar 0,132 persen dan 0,096 persen, yang merupakan variabel dari Faktor Stabilisasi atau Pengaturan pada Aspek Fungsional. Hal ini menunjukkan bahwa responden menganggap stabilisasi dan pengaturan terhadap masalah berkembangnya serta bertambahnya jumlah PKL menjadi *concern* utama dalam menangani permasalahan PKL di Kawasan Gasibu Bandung.

Rangking selanjutnya adalah Dipindahkan/Pengembangan di Lokasi baru dengan bobot sebesar 0,053 persen, yang merupakan variabel dari Faktor Pemugaran atau Relokasi. Hal ini mungkin dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi/manfaat fasilitas dan ruang publik kota, dengan melakukan relokasi lokasi PKL di Kawasan Gasibu. Menurut hasil wawancara dengan responden, kebijakan penanganan PKL memang bertujuan untuk meminimalkan jumlah PKL, bahkan bila mungkin dihilangkan, dengan pemahaman mereka dapat meningkatkan usahanya dan masuk ke kegiatan ekonomi skala usaha kecil (sektor formal). Sehingga fasilitas ruang publik kota (*fasos/fasum*) dapat dikembalikan fungsinya sebagaimana mestinya.

Apabila dilihat dari nilai bobot prioritasnya pada 5 prioritas teratas, dari 20 jenis alternatif tersebut, terdapat 2 (dua) jenis alternatif arahan berasal dari pertimbangan Faktor Keselamatan dan keamanan dan 3 (tiga) jenis strategi berasal dari pertimbangan Faktor Aspek Fungsional. Hal ini tentunya konsisten dengan

hasil pembobotan dalam faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk penanganan PKL sebelumnya, dimana prioritasnya secara berurutan adalah Faktor Fungsional, Faktor Keamanan dan Keselamatan, Faktor Kenyamanan, Faktor Aksesibilitas dan Faktor Struktural.

Kemudian bila prioritas Arahan Penataan PKL di pisahkan dan diurutkan sesuai bobot dari terbesar hingga terkecil berdasarkan Faktor-faktor utamanya adalah sebagai berikut:

Tabel IV.21
Bobot Final Alternatif Penataan PKL berdasarkan Faktor Level Pertama

Alternatif Arahan	Bobot Final (%)	Rangking
Faktor Lokasional		
Pengendalian/Pembatasan dan Pengurangan Jumlah PKL dalam Kawasan Gasibu	0,131790	1
Peruntukan dalam ruang terbuka (open market)	0,096040	2
Dipindahkan/Pengembangan di Lokasi baru	0,053144	3
Pemanfaatan bagian tertentu dari kawasan dan jalan atau trotoar	0,010368	4
Pembebasan atau penutupan jalan-jalan tertentu	0,008644	5
Menghilangkan/Penertiban aktifitas PKL pada ruang fungsional	0,002114	6
Faktor Struktural		
Pembinaan/advokasi Sosial (termasuk Kesehatan dan Agama) terhadap PKL	0,009113	1
Legalisasi bagi PKL	0,001065	2
Bantuan atau pinjaman	0,000274	3
Faktor Aksesibilitas		
Pola Berkelompok dengan yang dagangan yang sejenis	0,011279	1
Memberikan Arahan jalur Keluar-Masuk Kawasan	0,005932	2
Pengaturan Waktu berjualan	0,002328	3
Pola Bercampur dengan jenis dagangan lain	0,001976	4
Faktor Kenyamanan		
Pengalokasian tempat parkir	0,040768	1
Pengadaan Tempat sampah	0,023833	2
Pengadaan/peningkatan Utilitas air bersih	0,019773	3
Pengadaan MCK/Toilet Umum	0,015925	4
Faktor Keselamatan & Keamanan		
Pengaturan/Pemanfaatan sub ruang & komponen yang cukup	0,317652	1
Antisipasi dan Pengawasan keamanan Kawasan oleh pihak keamanan	0,204838	2

Sumber: Hasil Analisis, 2012

4.4 Analisis Hubungan Antara Hasil Analisis Persepsi PKL, Persepsi pengunjung dan AHP

Dari Hasil Analisis Persepsi dari Pedagang, Pengunjung dan Analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP). selanjutnya dilakukan penggabungan hasil analisis tersebut dalam satu tabel matriks kesesuaian untuk mengintegrasikan semua hasil analisis sebelumnya dan mengambil langkah dalam penataan PKL di Kawasan Gasibu. Oleh karena itu pada bagian ini akan diuraikan hubungan antara persepsi PKL dan persepsi pengunjung dan *expert* dari Pakar. Untuk mempermudah dibuat Tabel IV.22 sebagai berikut:

Tabel IV.22
Hubungan Persepsi PKL dan Persepsi Pengunjung dan Expert dari Pakar

Zona	Faktor	Persepsi PKL	Persepsi Pengunjung	Expert dari Pakar	Hasil Kajian
Z O N A 1	Faktor Penanganan masalah Lokasional PKL	Paling Penting bagi PKL: - Mengatur lokasi peruntukan kegiatan di zona ini	Paling Penting bagi Pengunjung : - Pengendalian/Pembatasan jumlah pedagang di zona ini pada hari minggu pagi	Paling Penting: - Pengendalian/Pembatasan dan Pengurangan Jumlah PKL dengan bobot 0,132%	Penanganan yang dipilih untuk memecahkan masalah kemacetan lalu-lintas di Kawasan Zona 1 adalah - Mengatur lokasi peruntukan kegiatan di Gasibu pada hari minggu pagi - Pembatasan jumlah PKL
	Faktor Peran Struktural Pemerintah	Paling Penting bagi PKL: - legalisasi/perizinan untuk berdagang dari pemerintah	Paling Penting bagi Pengunjung : - Pembinaan sosial dari pemerintah menjadi hal yang paling penting dalam usaha berdagang mereka	Paling Penting: - Pembinaan/advokasi Sosial (termasuk Kesehatan dan Agama) terhadap PKL dengan bobot 0,0091%	Peran struktural Pemerintah yang paling penting : - Pembinaan/advokasi Sosial (termasuk Kesehatan dan Agama) terhadap PKL - legalisasi untuk berdagang
	Faktor Aksesibilitas (Pengelompokan)	Paling Penting bagi PKL: - Pola pengelompokan dagangan dengan jenis dagangan yang berbeda (bercampur) PKL memilih : - setuju adanya pengaturan/penataan agar lebih menarik konsumen - memilih sarana	Paling Penting bagi Pengunjung : - Pola pengelompokan dagangan dengan jenis dagangan yang sama (Sejenis) dengan alasan mudah dicari calon pembeli Pengunjung memilih : - perlu adanya pengaturan/penataan dengan alasan lebih teratur rapi - memilih sarana dagang PKL yang paling perlu diatur	Paling Penting: - Pola Berkelompok dengan dagangan yang sejenis dengan bobot paling besar 0,0113% Paling Penting dari Pakar adalah - Memberikan Arahan jalur Keluar-Masuk Kawasan	Pola pengelompokan yang dipilih adalah : - pola pengelompokan dagangan yang sejenis dengan alasan agar mudah dicari oleh calon pembeli Dapat disimpulkan bahwa: - perlu adanya pengaturan dan penataan agar PKL lebih teratur rapi dan agar lebih menarik konsumen, - yang perlu diatur adalah

Zona	Faktor	Persepsi PKL	Persepsi Pengunjung	Expert dari Pakar	Hasil Kajian
		dagangnya yang paling perlu diatur			sarana dagang PKL, Jalur Keluar-Masuk Kawasan gasibu. Hal ini karena dapat memberikan kenyamanan dan nilai estetis sarana dagang para PKL
	Faktor Kenyamanan	Paling Penting bagi PKL: - Toilet <i>mobile/MCK</i> karena lokasi yang begitu padat dan jauh mengakibatkan ketidaknyamanan bagi PKL	Paling Penting bagi Pengunjung : - fasilitas yang perlu ditambah adalah sarana MCK/toilet	Paling Penting dari Pakar adalah - Alternatif pengalokasian tempat parkir menjadi paling penting dengan bobot terbesar 0,040%	Dapat disimpulkan bahwa: - Fasilitas umum yang Kurang memadai pada lokasi ini adalah <i>toilet mobile</i> - tempat parkir toilet sangat diperlukan bagi aktivitas PKL dan bagi pengunjung di lokasi ini untuk kenyamanan arus lalu lintas
Z O N A 2	Faktor Penanganan masalah Lokasional PKL	Paling Penting bagi PKL: - penutupan jalan-jalan tertentu di zona ini pada hari minggu pagi untuk memecahkan permasalahan kepadatan PKL	Paling Penting bagi Pengunjung : - pembatasan jumlah pedagang di zona ini pada hari minggu pagi untuk memecahkan permasalahan kepadatan PKL	Paling Penting dari Pakar adalah - Pengendalian/Pembatasan dan Pengurangan Jumlah PKL menjadi sangat penting	Penanganan yang dipilih adalah - Pengendalian/Pembatasan dan Pengurangan Jumlah PK - penutupan jalan-jalan tertentu untuk memecahkan masalah kemacetan lalu-lintas di Kawasan Zona 2
	Faktor Peran Struktural Pemerintah	Paling Penting bagi PKL: - legalisasi/perizinan dari pemerintah dalam usaha berdagang mereka	Paling Penting bagi Pengunjung : - bantuan atau pinjaman modal dari pemerintah dalam usaha berdagang mereka	Paling Penting dari Pakar adalah - Pembinaan/advokasi Sosial (termasuk Kesehatan dan Agama) terhadap PKL dengan bobot 0,0091%	Dapat disimpulkan bahwa: - Pembinaan/advokasi Sosial (termasuk Kesehatan dan Agama) terhadap PKL - legalisasi lokasi berdagang - bantuan modal atau pinjaman yang lebih penting

Zona	Faktor	Persepsi PKL	Persepsi Pengunjung	Expert dari Pakar	Hasil Kajian
	Faktor Aksesibilitas	<p>Paling Penting bagi PKL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pola pengelompokan dagangan dengan jenis dagangan yang sama (Sejenis) dengan alasan mudah dicari konsumen 	<p>Paling Penting bagi Pengunjung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola pengelompokan dagangan dengan jenis dagangan yang sama (Sejenis) dengan alasan mudah dicari konsumen 	<p>Paling Penting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola Berkelompok dengan dagangan yang sejenis dengan bobot paling besar 0,0113% 	<p>Pola pengelompokan yang dipilih adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dengan pola pengelompokan dagangan yang sejenis dengan alasan Mudah dicari konsumen
		<p>PKL memilih :</p> <ul style="list-style-type: none"> - setuju adanya pengaturan/penataan dengan alasan lebih teratur rapi dan; - memilih tempat usahanya yang paling perlu diatur 	<p>Pengunjung memilih :</p> <ul style="list-style-type: none"> - perlu adanya pengaturan/ penataan dengan alasan lebih teratur rapi dan; - memilih sarana dagang PKL yang paling perlu diatur 	<p>Paling Penting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Arahan jalur Keluar-Masuk Kawasan 	<p>Dapat disimpulkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perlu adanya pengaturan dan penataan agar PKL lebih teratur rapi dan - yang perlu diatur adalah tempat usaha, sarana dagang PKL, Jalur Keluar-Masuk Kawasan gasibu
	Faktor Kenyamanan	<p>PKL memilih :</p> <ul style="list-style-type: none"> - fasilitas yang perlu ditambah adalah air bersih karena pada saat ini para pedagang membawa air sendiri dari rumahnya untuk mencukupi kebutuhan cuci piring 	<p>Pengunjung memilih :</p> <ul style="list-style-type: none"> - fasilitas yang perlu ditambah adalah sarana parkir 	<p>Paling Penting :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alternatif Pengalokasian tempat parkir dengan bobot terbesar 0,040% 	<p>Jadi Fasilitas umum yang dinilai Kurang memadai pada lokasi ini adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> - air bersih dan; - tempat parkir Karena toilet telah tersedia di zona ini
	Faktor Penanganan masalah Lokasional PKL	<p>Paling Penting bagi PKL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada zona ini dengan penutupan jalan-jalan tertentu 	<p>Paling Penting bagi Pengunjung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - penutupan jalan-jalan tertentu 	<p>Paling Penting :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian/Pembatasan dan Pengurangan Jumlah PKL dengan bobot paling besar yaitu 0,132% 	<p>Cara penanganan yang dipilih pada Zona 3 adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembatasan jumlah PKL dan penutupan jalan-jalan tertentu

Zona	Faktor	Persepsi PKL	Persepsi Pengunjung	Expert dari Pakar	Hasil Kajian
Z O N A 3	Faktor Peran Struktural Pemerintah	Paling Penting bagi PKL: - bantuan atau pinjaman modal pemerintah untuk kemajuan usaha berdagang mereka	Paling Penting bagi Pengunjung : - legalisasi/perizinan dari pemerintah dalam usaha berdagang PKL	Paling Penting : - Pembinaan/advokasi Sosial (termasuk Kesehatan dan Agama) terhadap PKL dengan bobot 0,0091%	Dapat disimpulkan bahwa: - Pembinaan/advokasi Sosial (termasuk Kesehatan dan Agama) terhadap PKL - bantuan modal atau pinjaman dari pemerintah - legalisasi lokasi berdagang
	Faktor Aksesibilitas	Paling Penting bagi PKL: - pola pengelompokan dagangan dengan jenis dagangan yang sama (Sejenis) dengan alasan mudah dicari konsumen	Paling Penting bagi Pengunjung : - pola pengelompokan dagangan dengan jenis dagangan yang sama (Sejenis) dengan alasan mudah dicari konsumen	Paling Penting : - Pola Berkelompok dengan dagangan yang sejenis dengan bobot paling besar	Pola pengelompokan yang dipilih adalah - pola pengelompokan dagangan yang sejenis karena dapat memudahkan calon pembeli untuk menemukan barang dagangan yang hendak dibelinya
		PKL memilih : - setuju adanya pengaturan/penataan dengan alasan lebih teratur rapi dan; - memilih sarana dagangnya yang perlu diatur	Pada Zona ini Pengunjung memilih : - setuju adanya pengaturan/penataan dengan alasan lebih teratur rapi dan; - memilih sarana dagang PKL yang perlu diatur	Paling Penting adalah: - Memberikan Arahkan jalur Keluar-Masuk Kawasan Gasibu	Dapat disimpulkan bahwa: - perlu adanya pengaturan dan penataan agar PKL lebih teratur rapi dan: - yang perlu diatur adalah sarana dagang PKL, Jalur Keluar-Masuk Kawasan gasibu
Faktor Kenyamanan	PKL memilih : - fasilitas yang perlu ditambah adalah air bersih	Pada Zona ini Pengunjung memilih : - fasilitas yang perlu ditambah adalah tempat parkir kendaraan	Paling Penting adalah: - Alternatif Pengalokasian tempat parkir	Fasilitas umum yang dinilai kurang memadai pada Zona 3 adalah - air bersih untuk kebutuhan Cuci piring pedagang - tempat parkir	

Sumber: Hasil analisis, tahun 2012